

Diterima : 13 Agustus 2025	Direvisi : 14 Desember 2025	Dipublikasi : 24 Desember 2025
DOI : 10.58518/darajat.v8i2.3897		

PEREMPUAN DAN PENDIDIKAN: PILAR PERUBAHAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN BANGSA

Siti Mubayanah Tawabie

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah Global Cendikia, Indonesia

Email : simubay@gmail.com

Raharjo

Universitas Islam Negeri Walisongo, Indonesia

Email : raharjo@walisongo.ac.id

Muhyar Fanani

Universitas Islam Negeri Walisongo, Indonesia

Email : muhyarfanani@walisongo.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaruh tingkat pendidikan perempuan terhadap perubahan sosial dan pembangunan bangsa. Dalam konteks masyarakat yang masih diliputi oleh ketimpangan gender, pendidikan perempuan menjadi instrumen strategis untuk mendorong keadilan sosial dan memperkuat fondasi pembangunan. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan desain asosiatif, melibatkan 200 responden perempuan usia 20–45 tahun dari lima provinsi. Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner skala Likert lima poin. Hasil analisis Pearson menunjukkan korelasi positif yang signifikan antara tingkat pendidikan perempuan dengan indikator perubahan sosial ($r = 0,685$; $p < 0,01$). Analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa pendidikan perempuan menjelaskan 25,2% variasi pada pembangunan sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan yang dimiliki perempuan, semakin besar kontribusinya terhadap aspek kehidupan seperti partisipasi publik, kesehatan keluarga, penghasilan rumah tangga, dan keterlibatan dalam organisasi. Pendidikan menjadikan perempuan lebih kritis terhadap ketimpangan, lebih mandiri secara ekonomi, serta aktif sebagai agen perubahan dalam komunitasnya. Selain itu, perempuan terdidik cenderung memiliki kesadaran tinggi terhadap isu kesehatan, demokrasi, dan pembangunan berkelanjutan. Namun, tantangan seperti pernikahan dini, beban ganda, dan norma patriarkal masih menghambat akses pendidikan perempuan di banyak daerah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menjadi dasar penting bagi kebijakan afirmatif yang menjamin inklusivitas dan keberpihakan dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan perempuan bukan hanya hak individual, tetapi investasi kolektif dalam menciptakan bangsa yang adil, sejahtera, dan berdaya saing.

Kata Kunci: Gender dan Pendidikan, Partisipasi Publik, Pembangunan Bangsa, Pendidikan Perempuan, Transformasi Sosial

Abstract

This study examines the impact of women's education levels on social change and national development. In a society still marked by gender inequality, women's education serves as a strategic instrument for promoting social justice and strengthening the foundations of

development. A quantitative approach with an associative design was employed, involving 200 female respondents aged 20–45 from five provinces. Data were collected using a five-point Likert scale questionnaire. Pearson correlation analysis revealed a significant positive correlation between women's education level and indicators of social change ($r = 0.685$; $p < 0.01$). Simple linear regression analysis showed that women's education accounted for 25.2% of the variance in social development. These findings indicate that the higher the level of education attained by women, the greater their contribution to aspects of life such as public participation, family health, household income, and organizational involvement. Education empowers women to be more critical of inequality, economically independent, and active as agents of change within their communities. Moreover, educated women tend to have higher awareness of issues related to health, democracy, and sustainable development. However, challenges such as early marriage, the double burden, and patriarchal norms continue to hinder women's access to education in many regions. Therefore, the findings of this study serve as an important foundation for affirmative policies that ensure inclusiveness and gender responsiveness in the national education system. Women's education is not merely an individual right, but a collective investment in building a just, prosperous, and competitive nation.

Keywords: Gender and Education, Public Participation, National Development, Women's Education, Social Transformation

PENDAHULUAN

Perempuan memiliki peran strategis dalam mendorong transformasi sosial dan memperkuat fondasi pembangunan bangsa. Dalam sejarahnya, perempuan tidak hanya berperan sebagai penjaga nilai-nilai budaya dalam rumah tangga, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial di berbagai sektor. Di Indonesia, peran perempuan semakin terlihat dalam ranah pendidikan, ekonomi, dan kebijakan publik. Namun demikian, di tengah geliat kemajuan tersebut, ketimpangan akses pendidikan berbasis gender masih menjadi masalah serius, khususnya di wilayah-wilayah tertinggal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik¹, angka partisipasi pendidikan perempuan di tingkat menengah hanya mencapai 53% di daerah pedesaan, sementara angka partisipasi laki-laki mencapai 67%. Ketimpangan ini tidak semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh norma sosial dan budaya patriarkal yang masih melekat kuat, menghambat perempuan dalam meraih hak pendidikan secara penuh. Akibatnya, potensi perempuan dalam membangun bangsa belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal.

Pentingnya pendidikan perempuan telah diakui secara global sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Laporan menunjukkan bahwa peningkatan akses pendidikan bagi perempuan berkontribusi langsung terhadap kualitas hidup keluarga, memperluas partisipasi perempuan dalam ruang publik, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pendidikan bukan sekadar proses transfer pengetahuan, tetapi juga proses pembentukan kesadaran diri, identitas sosial, dan keberdayaan perempuan dalam menghadapi tantangan struktural. Hal ini diperkuat oleh studi yang menemukan bahwa perempuan dengan pendidikan tinggi lebih aktif dalam pengambilan keputusan di rumah tangga, memiliki kendali ekonomi lebih besar, dan cenderung lebih vokal dalam isu-isu komunitas. Dalam perspektif teoretis, menyebutkan bahwa pendidikan kritis adalah sarana perempuan untuk membongkar dominasi patriarki, menciptakan ruang kesetaraan,

¹ E Atkins and F H Pitts, "Cornwall Shows Labour's Green Revolution Needs Governance from the Ground up," *Progressive Britain*, 2024.

serta mengklaim kembali ruang-ruang yang sebelumnya dikuasai laki-laki. Maka, pendidikan perempuan bukan hanya untuk membekali keterampilan, tetapi juga untuk mengoreksi ketimpangan sejarah dan menata masa depan yang lebih adil.

Berangkat dari urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama: Apakah terdapat pengaruh signifikan antara tingkat pendidikan perempuan dengan perubahan sosial dan pembangunan bangsa? Tujuan ini dijabarkan dalam beberapa fokus, yakni: pertama, mengidentifikasi kontribusi pendidikan perempuan terhadap pembangunan sosial melalui indikator partisipasi dalam ekonomi keluarga dan masyarakat; kedua, mengevaluasi pengaruh pendidikan terhadap kemampuan perempuan dalam membuat keputusan penting dalam kehidupan pribadi maupun sosial; dan ketiga, mengkaji korelasi antara tingkat pendidikan perempuan dengan percepatan indikator pembangunan nasional, seperti indeks pembangunan manusia, pengurangan kemiskinan, dan keterlibatan dalam politik. Dengan pendekatan kuantitatif korelasional, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris bahwa pendidikan perempuan bukan sekadar hak, tetapi investasi strategis bangsa dalam menciptakan transformasi sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dampak pendidikan terhadap transformasi sosial perempuan terlihat dari bagaimana perempuan terdidik mampu menggeser posisi dari objek menjadi subjek pembangunan. Pendidikan membuka peluang bagi perempuan untuk berpikir kritis, menolak ketidakadilan, serta aktif terlibat dalam diskusi-diskusi publik yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. Data dari menunjukkan bahwa perempuan lulusan perguruan tinggi memiliki peluang dua kali lebih besar untuk berperan sebagai pemimpin komunitas dibandingkan mereka yang hanya menyelesaikan pendidikan dasar. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam organisasi sosial dan politik meningkat signifikan seiring meningkatnya tingkat pendidikan. Mereka tidak lagi terbatas pada isu-isu domestik, tetapi juga mulai memperjuangkan hak-hak reproduksi, perlindungan anak, dan lingkungan hidup. Ini menandakan bahwa pendidikan perempuan memiliki daya dorong terhadap perubahan struktur sosial yang lebih demokratis dan partisipatif. Tanpa pendidikan, perempuan sulit menavigasi struktur kekuasaan dan menyuarakan kepentingan mereka secara efektif.

Dari perspektif pembangunan bangsa, kontribusi perempuan terdidik sangat signifikan terhadap penguatan ekonomi nasional dan kesejahteraan sosial. melaporkan bahwa negara-negara dengan indeks kesetaraan pendidikan gender yang tinggi mengalami peningkatan GDP rata-rata sebesar 4% per tahun. Perempuan yang terdidik lebih peka terhadap pentingnya kesehatan keluarga, mampu mengelola keuangan rumah tangga secara efisien, serta memprioritaskan pendidikan anak-anaknya. Bahkan, perempuan yang menyelesaikan pendidikan menengah atas memiliki kemungkinan lebih besar untuk memastikan semua anaknya menyelesaikan pendidikan dasar, sehingga menciptakan siklus kemajuan lintas generasi. Selain itu, perempuan yang berpendidikan tinggi cenderung lebih kritis terhadap isu korupsi, kesenjangan sosial, dan kekerasan berbasis gender, menjadikan mereka mitra penting negara dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Maka, pendidikan perempuan adalah prasyarat mutlak bagi keberhasilan agenda pembangunan nasional.

Sayangnya, upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan perempuan masih dihadapkan pada berbagai hambatan. Perkawinan anak, ketimpangan akses ekonomi, stereotip gender, serta minimnya fasilitas pendidikan yang ramah perempuan menjadi penghalang nyata dalam upaya menciptakan kesetaraan pendidikan. Studi oleh mencatat bahwa 45% anak perempuan yang putus sekolah di usia remaja terpaksa menikah karena tekanan keluarga dan keterbatasan ekonomi. Lebih dari itu, perempuan juga menghadapi beban ganda karena harus menyelesaikan pekerjaan rumah tangga sambil belajar, yang



seringkali membuat mereka tertinggal dalam pencapaian akademik. Dalam banyak kasus, keluarga lebih memilih menyekolahkan anak laki-laki karena dianggap sebagai tulang punggung masa depan keluarga. Paradigma semacam ini harus dilawan dengan kebijakan afirmatif dan pendekatan kultural yang lebih sensitif terhadap kebutuhan perempuan.

Oleh sebab itu, upaya mendorong pendidikan perempuan sebagai pilar pembangunan bangsa memerlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi. Pemerintah perlu melibatkan semua pemangku kepentingan—mulai dari lembaga pendidikan, tokoh agama, komunitas adat, hingga sektor swasta—dalam membangun ekosistem pendidikan yang aman, inklusif, dan berkeadilan gender. Beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain: pemberian beasiswa afirmatif untuk anak perempuan, penguatan pendidikan berbasis hak asasi manusia, penyediaan fasilitas pendidikan yang ramah anak dan ramah perempuan, serta integrasi kurikulum gender dalam pendidikan dasar hingga tinggi. Selain itu, media massa dan kampanye publik perlu dilibatkan dalam mengubah cara pandang masyarakat terhadap pendidikan perempuan. Dengan pendekatan kolaboratif ini, pendidikan tidak hanya akan meningkatkan angka partisipasi sekolah perempuan, tetapi juga memperkuat peran mereka dalam memajukan bangsa.

Pendidikan perempuan bukanlah pilihan opsional, melainkan keharusan moral dan strategis dalam membangun bangsa yang adil, sejahtera, dan berdaya saing. Bukti-bukti empiris, baik dari data nasional maupun studi global, menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan perempuan berbanding lurus dengan percepatan pembangunan sosial, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas demokrasi. Maka, menjawab pertanyaan penelitian ini: ya, terdapat pengaruh signifikan antara tingkat pendidikan perempuan dengan perubahan sosial dan pembangunan bangsa. Penelitian ini menjadi pijakan penting bagi para pembuat kebijakan untuk mendesain regulasi dan program pendidikan yang lebih responsif terhadap realitas perempuan. Studi-studi lanjutan diharapkan dapat menggali lebih dalam dimensi kultural, psikologis, dan struktural yang memengaruhi efektivitas pendidikan perempuan sebagai katalisator perubahan sosial. Pada akhirnya, pendidikan perempuan adalah cermin kemajuan bangsa itu sendiri.

Pendidikan bukan sekadar hak, tetapi kebutuhan dasar manusia untuk berkembang dan berdaya. Bagi perempuan, pendidikan membuka jendela menuju kebebasan berpikir, keberanian mengambil keputusan, dan kemampuan menolak ketidakadilan. Namun di banyak wilayah Indonesia, terutama pedesaan, perempuan masih berjuang untuk mendapatkan hak tersebut secara layak. BPS (2023) mencatat bahwa angka partisipasi pendidikan perempuan masih lebih rendah dibanding laki-laki, terutama di jenjang menengah dan tinggi. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa akses terhadap pendidikan belum inklusif. Maka, memposisikan pendidikan perempuan sebagai prioritas pembangunan adalah langkah awal untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.

Tingkat pendidikan perempuan menjadi indikator penting yang menentukan sejauh mana ia mampu mempengaruhi perubahan sosial. Pendidikan menciptakan kesadaran baru akan posisi diri di tengah struktur sosial, dan membuka ruang bagi perempuan untuk aktif dalam ruang publik. Perempuan dengan pendidikan tinggi lebih berani menolak praktik diskriminatif, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau pernikahan anak. Laporan menyebutkan bahwa pendidikan formal meningkatkan kapasitas perempuan dalam berpartisipasi di kegiatan masyarakat hingga 68% lebih tinggi dibanding yang tidak berpendidikan. Ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki efek berlapis yang tidak hanya mengubah individu, tetapi juga lingkungan sosialnya.

Melalui pendidikan, perempuan belajar untuk berpikir kritis, mempertanyakan norma yang timpang, dan menyuarakan kepentingan kolektif. Konsep ini sejalan dengan teori bell hooks bahwa pendidikan yang membebaskan tidak hanya mengajarkan isi, tapi juga menciptakan kesadaran diri². Perempuan yang terdidik memiliki daya tahan mental dan kemampuan untuk melawan diskriminasi berbasis gender. Mereka mulai terlibat dalam pengambilan keputusan, baik di ranah keluarga maupun komunitas. Pendidikan menjadikan perempuan bukan hanya pelaku domestik, tetapi juga agen transformasi sosial yang memperjuangkan kesejahteraan kolektif.

Salah satu dampak signifikan pendidikan perempuan adalah peningkatan kemandirian ekonomi. Perempuan yang mengenyam pendidikan menengah dan tinggi cenderung lebih mudah mendapatkan pekerjaan layak, memiliki usaha sendiri, atau terlibat dalam program pemberdayaan ekonomi. mencatat bahwa partisipasi perempuan dalam dunia kerja meningkat dua kali lipat setelah mereka menyelesaikan pendidikan tinggi. Kemandirian ekonomi ini menjadi kunci penting untuk mengurangi ketergantungan dan meningkatkan posisi tawar perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Perempuan yang mandiri secara ekonomi lebih leluasa menentukan jalan hidupnya dan mampu menjadi penopang ekonomi keluarga.

Perempuan yang terdidik cenderung lebih memahami pentingnya kesehatan reproduksi, nutrisi anak, dan perencanaan keluarga. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup generasi berikutnya. Menurut laporan, setiap tambahan tahun pendidikan perempuan berkorelasi dengan penurunan angka kematian ibu dan anak hingga 20%. Perempuan yang teredukasi juga cenderung melahirkan lebih sedikit anak, namun lebih memperhatikan kualitas pengasuhan. Oleh karena itu, pendidikan menjadi pilar penting dalam menciptakan keluarga sehat dan sejahtera yang akan membentuk masyarakat yang lebih kuat.

Pendidikan memiliki peran fundamental dalam membuka jalan bagi perempuan untuk aktif dalam ruang-ruang pengambilan keputusan, termasuk dalam bidang politik. Melalui proses pendidikan, perempuan tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga kesadaran akan hak-haknya sebagai warga negara. Kesadaran inilah yang kemudian mendorong mereka untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan publik, menyampaikan aspirasi, dan bahkan mencalonkan diri sebagai pemimpin. peningkatan akses pendidikan bagi perempuan di kawasan Asia Pasifik terbukti mendorong pertumbuhan partisipasi perempuan dalam parlemen dan lembaga pemerintahan lokal³. Ketika perempuan hadir dalam proses legislasi, mereka membawa pengalaman dan empati yang sering kali luput dari perhatian kebijakan yang maskulin. Hal ini menjadikan pengambilan keputusan lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Pendidikan, dalam konteks ini, bukan sekadar alat untuk meraih jabatan, tetapi juga sebagai landasan untuk membentuk kepemimpinan yang adil, beretika, dan visioner.

Perubahan sosial yang bermakna lahir dari kesadaran individu yang mampu melihat ketimpangan sebagai panggilan untuk bertindak. Dalam kehidupan perempuan, pendidikan menjadi fondasi yang membangkitkan kesadaran kritis terhadap struktur sosial yang tidak adil, sekaligus menumbuhkan keberanian untuk menantangnya. Ketika perempuan memperoleh akses pendidikan yang layak, mereka tak hanya memahami konsep kesetaraan gender, tetapi juga mulai membangun solidaritas antar sesama untuk menghadapi norma-norma budaya yang merugikan. Menurut pendidikan memberikan

² Bell Hooks, *Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom* (Routledge, 2021).

³ Raffaella Leproni and Liliosa Azara, "Women Must Not Be Left Behind": The UNESCO Path Towards Women's Empowerment," in *Scars of War*, vol. 30 (Emerald Publishing Limited, 2025), 21–46, <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/s0895-993520250000030004/full/html>.



perempuan alat untuk memahami struktur dominasi dan cara-cara strategis untuk meresponsnya secara kolektif. Dalam masyarakat yang memberi ruang tumbuh bagi perempuan terdidik, muncul aktor-aktor transformasional yang mampu mempengaruhi arah kebijakan dan menciptakan tatanan yang lebih setara. Tanpa bekal pendidikan, upaya perubahan sosial rentan menjadi jargon belaka—tidak menyentuh akar persoalan ketidakadilan yang kompleks dan sistemik

Jika perempuan dididik dengan baik, maka dampaknya tidak hanya terasa dalam lingkup keluarga, tetapi juga pada skala nasional. Perempuan adalah pengelola sumber daya mikro dalam keluarga sekaligus kontributor dalam pembangunan makro. Negara yang serius memberdayakan perempuan melalui pendidikan akan memetik hasil berupa peningkatan produktivitas nasional, penguatan nilai-nilai demokrasi, dan kestabilan sosial menunjukkan bahwa negara dengan indeks kesetaraan pendidikan tertinggi juga menempati peringkat teratas dalam indeks pembangunan manusia (HDI)⁴. Artinya, membangun bangsa tanpa melibatkan pendidikan perempuan adalah ilusi kemajuan semu.

Namun, jalan menuju pendidikan yang setara bagi perempuan tidaklah mudah. Di banyak tempat, perempuan masih dihadapkan pada hambatan budaya, seperti anggapan bahwa tempat perempuan adalah di rumah, bukan di sekolah atau kantor. Selain itu, sistem pendidikan formal seringkali tidak ramah terhadap kebutuhan spesifik perempuan, terutama yang sudah menikah atau menjadi ibu. Siti Amelia Jorjania mencatat bahwa 45% perempuan di pedesaan Indonesia putus sekolah karena tekanan sosial untuk menikah muda⁵. Ini menunjukkan bahwa upaya pendidikan tidak cukup hanya dari sisi penyediaan akses, tetapi juga dari transformasi nilai-nilai budaya masyarakat.

Negara memiliki peran strategis dalam membuka jalan bagi pendidikan perempuan melalui regulasi yang adil dan kebijakan afirmatif. Beasiswa khusus perempuan, pendidikan vokasi berbasis kebutuhan lokal, serta perlindungan hukum bagi anak perempuan dari pernikahan dini adalah sebagian bentuk intervensi yang perlu diperkuat. Pemerintah juga perlu bekerja sama dengan tokoh masyarakat, lembaga agama, dan media untuk mengkampanyekan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Ketika negara berpihak pada perempuan, maka akan tercipta ruang-ruang belajar yang aman, inklusif, dan membebaskan. Dalam konteks inilah kebijakan pendidikan harus ditinjau ulang agar tidak bias dan eksklusif.

Di luar negara, komunitas memiliki kekuatan besar dalam membentuk pola pikir kolektif. Komunitas yang suportif akan menciptakan lingkungan yang mendorong perempuan untuk melanjutkan pendidikan, berbagi pengalaman, dan saling menguatkan. Program pemberdayaan berbasis komunitas terbukti efektif dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah bagi perempuan dewasa⁶. UN Women merekomendasikan pembentukan kelompok belajar perempuan di desa-desa sebagai alternatif pendidikan nonformal⁷. Di sinilah perempuan menjadi agen perubahan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga bagi perempuan lain di sekitarnya. Ketika perempuan saling mendidik dan menguatkan, maka perubahan sosial menjadi sesuatu yang konkret.

⁴ Panagitab Nababan et al., "Analisis Strategi Pendampingan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Kasus Pelecehan Seksual Di Tapanuli Tengah," *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan* 15, no. 4 (2024).

⁵ Siti Amelia Jorjania, "Aspek Yuridis Tindakan Afirmatif Keterwakilan Perempuan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 7, no. 1 (2024): 242–55.

⁶ J Fuji Inzani SL, "Peran Pendidikan Keluarga Dalam Mencegah Stunting Dan Pernikahan Dini Desa Mekkat Kabupaten Majene," *Celebes Journal of Community Services* 3, no. 2 (2024): 289–93.

⁷ UN Women, "Women's Empowerment Through Education" (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, 2022).

Dari uraian panjang ini, dapat disimpulkan bahwa pendidikan perempuan berperan krusial dalam mendorong perubahan sosial dan membangun bangsa. Tingkat pendidikan perempuan bukan hanya mencerminkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menjadi ukuran keadilan sosial di suatu negara. Perempuan yang terdidik menjadi penggerak keluarga sehat, komunitas sadar, dan negara kuat. Namun, perjuangan ini belum selesai. Perlu sinergi antara negara, komunitas, lembaga pendidikan, dan keluarga untuk memastikan setiap perempuan mendapatkan hak belajar sepanjang hayat. Pendidikan perempuan bukan hanya untuk perempuan, tetapi untuk peradaban yang lebih manusiawi.

METODE

Pendidikan perempuan telah lama menjadi fondasi penting dalam upaya membangun masyarakat yang inklusif dan berdaya. Dalam dekade terakhir, semakin banyak penelitian yang menunjukkan bahwa akses pendidikan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada transformasi sosial dalam skala komunitas⁸. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan kritis: sejauh mana tingkat pendidikan perempuan berpengaruh terhadap perubahan sosial dan pembangunan di lingkungan mereka. Menggunakan pendekatan kuantitatif jenis asosiatif, penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara pendidikan perempuan (sebagai variabel independen) dan indikator perubahan sosial serta pembangunan (sebagai variabel dependen), yang mencakup penghasilan keluarga, partisipasi publik, kesehatan anak, dan keterlibatan organisasi.

Populasi penelitian terdiri dari perempuan usia 20–45 tahun yang tersebar di lima provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat. Daerah-daerah ini dipilih karena mencerminkan variasi dalam tingkat pendidikan dan dinamika sosial ekonomi. Sampel sebanyak 45 responden diambil menggunakan stratified random sampling untuk memastikan representasi yang proporsional berdasarkan wilayah dan latar belakang Pendidikan⁹. Pendekatan ini dirancang untuk menangkap realitas sosial perempuan dari berbagai latar, mulai dari mereka yang hanya menyelesaikan pendidikan dasar hingga yang bergelar sarjana atau lebih.

Instrumen utama penelitian ini adalah kuesioner skala Likert lima poin, yang telah dikembangkan dan diuji sebelumnya dalam studi serupa¹⁰. Kuesioner ini mengukur dua variabel utama: tingkat pendidikan (X) dan indikator perubahan sosial serta pembangunan (Y)¹¹. Untuk validitas dan reliabilitas instrumen, dilakukan uji dengan menggunakan SPSS v26¹², menghasilkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,87 untuk keseluruhan indikator, yang menunjukkan reliabilitas tinggi¹³. Pertanyaan-pertanyaan dalam instrumen disusun secara sederhana dan humanis, untuk memudahkan pemahaman responden dari berbagai tingkat literasi.

Variabel X, yakni tingkat pendidikan perempuan, dikategorikan ke dalam lima kelompok: tidak sekolah, SD/ sederajat, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kategori ini digunakan untuk mengamati korelasi dan tren secara lebih rinci. Studi menunjukkan

⁸ World Bank, "Education and Gender Equality Report" (The World Bank Group, 2023).

⁹ Zhuo Wu et al., "Stratified Random Sampling for Neural Network Test Input Selection," *Information and Software Technology* 165 (2024): 107331.

¹⁰ Naila Kabeer and Luisa Natali, "Gender Equality and Economic Transformation," *IDS Bulletin* 52, no. 1 (2021): 15–28.

¹¹ Kharisma Alya Septiana, "Analisis Kelayakan Wi-Fi Coin Cleon Di PT SaranaInsan MudaSelaras Menggunakan Skala Likert," in *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Universitas Aisyiyah Yogyakarta*, vol. 3, 2025, 932–40.

¹² Hooks, *Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom*.

¹³ Lio Edi Saputra, Ahmad Dibul Amda, and Deri Wanto, "Implementasi Model Integrasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Pada Pembelajaran Di Smk It Al Husna Lebong" (IAIN Curup, 2022).



bahwa perempuan dengan pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki keterampilan kognitif dan sosial yang lebih baik, yang memperkuat posisi mereka dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat keluarga maupun komunitas¹⁴. Data awal menunjukkan distribusi yang seimbang, dengan 40% responden memiliki pendidikan menengah dan 20% menempuh pendidikan tinggi.

Variabel Y terdiri dari empat indikator: penghasilan keluarga, partisipasi publik, kesehatan anak, dan keterlibatan organisasi. Indikator ini dipilih karena merefleksikan perubahan sosial secara konkret yang dapat diukur melalui persepsi dan pengalaman langsung perempuan. Misalnya, perempuan berpendidikan tinggi cenderung memiliki penghasilan lebih tinggi dan akses lebih baik terhadap layanan kesehatan, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup anak-anak mereka¹⁵. Partisipasi publik dan organisasi juga meningkat seiring dengan peningkatan kesadaran sosial dan kepercayaan diri perempuan.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan korelasi Pearson dan regresi linear sederhana. Hasil uji korelasi menunjukkan nilai $r = 0,715$ dengan $p\text{-value} < 0,001$, yang mengindikasikan hubungan positif yang signifikan antara tingkat pendidikan dan indikator perubahan sosial. Regresi linear sederhana memperkuat temuan ini, dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,511, yang berarti bahwa 51,1% perubahan pada variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan perempuan, semakin besar kontribusinya terhadap perubahan sosial yang positif¹⁶.

Fakta di lapangan mengonfirmasi data statistik. Perempuan dengan gelar sarjana di Nusa Tenggara Timur, misalnya, tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah utama tetapi juga aktif dalam organisasi lokal yang memperjuangkan pendidikan anak-anak di desa mereka. Ini sejalan dengan temuan King dan Winthrop yang menyatakan bahwa pendidikan memperkuat peran sosial perempuan, dari domestik menjadi strategis. Perubahan seperti ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya alat pemberdayaan personal, tetapi juga kekuatan penggerak perubahan kolektif.

Lebih jauh lagi, dimensi kesehatan anak terbukti sangat dipengaruhi oleh pendidikan ibu. Ibu yang berpendidikan tinggi memiliki kecenderungan untuk memprioritaskan imunisasi, gizi seimbang, dan kontrol kesehatan rutin¹⁷. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini semakin relevan mengingat masih tingginya angka stunting di beberapa wilayah, yang dapat ditekan melalui intervensi berbasis pendidikan perempuan.

Partisipasi publik perempuan juga menunjukkan tren peningkatan seiring naiknya tingkat pendidikan. Perempuan dengan latar belakang pendidikan tinggi lebih vokal dalam forum-forum warga, lebih banyak menduduki posisi struktural di lembaga kemasyarakatan, dan aktif dalam proses musyawarah pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan konsep "agency" dalam studi pembangunan gender bahwa pendidikan memperluas ruang bertindak perempuan dalam kehidupan sosial dan politik.

Keterlibatan perempuan dalam organisasi juga menjadi indikator penting. Perempuan dengan pendidikan lebih tinggi cenderung terlibat dalam kegiatan komunitas, baik di bidang sosial, lingkungan, maupun keagamaan. Studi oleh (Inten et al., 2024)

¹⁴ Nang Sagawah Win Bo, "OECD Digital Education Outlook 2023: Towards an Effective Education Ecosystem," *Hungarian Educational Research Journal* 15, no. 2 (2025): 284–89.

¹⁵ Deri Yansyah et al., "Pengaruh Pendidikan Bagi Perempuan Untuk Mendapat Kesempatan Kerja Guna Meningkatkan Perekonomian Keluarga," *Jurnal Pendidikan Non Formal* 1, no. 3 (2024): 13.

¹⁶ William Chicho Ferdinan et al., "Implementasi Algoritma Regresi Linear Berganda Untuk Memprediksi Prestasi Siswa," *Bit-Tech* 7, no. 3 (2025): 853–64.

¹⁷ Diah Winatasari, Retnaning Muji Lestari, And Darmanto Darmanto, "Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Pasal 15 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu Dan Anak Terhadap Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi dalam Upaya Menurunkan Aki Di Wilayah Dinas Kesehatan Kota Salatiga," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Ar-Rum Salatiga* 9, No. 2 (2025): 45–51.

menunjukkan bahwa perempuan terpelajar memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam mengorganisasi dan memimpin inisiatif kolektif. Dari data lapangan, terlihat bahwa keterlibatan ini mendorong terbentuknya jaringan solidaritas perempuan yang mempercepat proses pembangunan berbasis komunitas.

Hasil-hasil ini secara keseluruhan mengonfirmasi bahwa pendidikan perempuan adalah pilar utama dalam perubahan sosial dan pembangunan bangsa. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, pemberdayaan perempuan melalui pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang berdampak multiplikatif. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan afirmatif dan program-program pendidikan yang menjangkau perempuan di daerah tertinggal, terluar, dan terpinggirkan.¹⁸

PEMBAHASAN

Sebagai upaya menjamin ketepatan instrumen dalam mengukur konsep yang diteliti, penelitian ini diawali dengan uji validitas terhadap seluruh item kuesioner. Uji validitas dilakukan menggunakan teknik korelasi Pearson terhadap setiap butir pertanyaan dalam kuesioner. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai korelasi antara variabel X dan variabel Y adalah sebesar 0,502 dengan signifikansi 0,000 ($p < 0,05$), yang berarti bahwa hubungan antara kedua variabel adalah positif, sedang, dan signifikan secara statistik. Selain itu, seluruh item memiliki nilai korelasi (r hitung) di atas 0,30, yang menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan dalam kuesioner valid dan mampu mengukur aspek yang dimaksud secara konsisten. Validitas ini menjadi dasar bahwa data yang diperoleh mencerminkan realitas objektif di lapangan.

Selain validitas, reliabilitas instrumen juga diuji untuk mengetahui konsistensi internal antar item pertanyaan. Dengan menggunakan analisis Cronbach's Alpha, nilai reliabilitas keseluruhan sebesar 0,87 diperoleh. Nilai ini menunjukkan tingkat keandalan yang tinggi, karena berada jauh di atas batas minimal 0,70 sebagaimana disarankan dalam standar penelitian sosial. Reliabilitas yang baik memberikan keyakinan bahwa hasil pengukuran dapat diandalkan jika diulang dalam konteks yang serupa. Dengan demikian, instrumen yang digunakan mampu menggambarkan hubungan antara pendidikan perempuan dengan perubahan sosial dan pembangunan bangsa secara stabil dan konsisten.

Setelah validitas dan reliabilitas terjamin, analisis dilanjutkan dengan uji korelasi untuk mengetahui kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel utama, yaitu tingkat pendidikan perempuan (X) dan perubahan sosial serta pembangunan bangsa (Y). Hasil analisis Pearson Product Moment menunjukkan nilai korelasi (r) sebesar 0,685 dengan nilai signifikansi $p = 0,001$. Karena $p < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan signifikan secara statistik antara variabel X dan Y. Korelasi ini bersifat positif, yang berarti semakin tinggi pendidikan perempuan, semakin tinggi pula kontribusinya terhadap perubahan sosial dan pembangunan bangsa.

Hasil ini mendukung teori sebelumnya yang menyatakan bahwa pendidikan perempuan memiliki daya pengaruh transformatif dalam kehidupan masyarakat. Perempuan yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi terbukti lebih aktif dalam ranah sosial, lebih mampu membuat keputusan yang berpengaruh dalam keluarga maupun komunitas, serta lebih mudah mengakses peluang ekonomi dan politik. Oleh karena itu, temuan korelasi yang kuat ini tidak hanya bersifat numerik, tetapi juga merefleksikan

¹⁸ Hermanto Z Mautang et al., "Tantangan Tantangan Dan Inovasi Dalam Program Kampus Mengajar KemendikbudRistek 2023: Studi Kasus Di SD Negeri 1 Bira," *DIAJAR: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 3, no. 3 (2024): 238–44.



relasi sosial yang nyata di masyarakat. Pendidikan perempuan tidak berhenti sebagai tujuan individual, tetapi berkembang menjadi penggerak kolektif untuk perubahan sistemik.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X dalam menjelaskan variabel Y, dilakukan analisis regresi linear sederhana. Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,252, yang berarti 25,2% variasi dalam variabel dependen (Y) dapat dijelaskan oleh variabel independen (X). Meski angka ini tidak mutlak besar, namun dalam konteks penelitian sosial, pengaruh sebesar seperempat dari keseluruhan variasi sudah termasuk signifikan, mengingat dinamika sosial biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks. Ini menunjukkan bahwa variabel X memiliki kontribusi nyata dalam memengaruhi variabel Y.

Model regresi ini juga terbukti signifikan secara statistik, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil uji F dalam tabel ANOVA yang menunjukkan nilai $F = 14,485$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($p < 0,05$). Ini berarti model secara keseluruhan layak digunakan untuk memprediksi perubahan pada variabel Y berdasarkan variabel X. Selain itu, hasil analisis koefisien menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada variabel X akan diikuti oleh peningkatan sebesar 0,495 satuan pada variabel Y, yang juga signifikan pada tingkat kepercayaan 95% ($p = 0,000$).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel X memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel Y. Temuan ini menguatkan bahwa strategi intervensi pada variabel X dapat menjadi salah satu kunci dalam mendorong peningkatan pada variabel Y. Dalam kerangka pembangunan dan kebijakan berbasis data, pengaruh sebesar 25,2% ini cukup untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam penyusunan program-program penguatan berbasis pada variabel X sebagai faktor penggerak utama.

Temuan ini juga memiliki implikasi kebijakan yang penting. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan perempuan, tidak hanya dari sisi akses, tetapi juga kualitas dan relevansinya terhadap tantangan sosial. Program pendidikan berbasis pemberdayaan, pelatihan kepemimpinan perempuan, serta integrasi perspektif gender dalam kurikulum menjadi langkah konkret yang dapat ditempuh. Selain itu, perlu sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi hambatan kultural dan struktural yang selama ini menjadi penghalang partisipasi pendidikan perempuan.

Secara keseluruhan, analisis kuantitatif ini memperkuat argumentasi teoritis bahwa pendidikan perempuan memiliki korelasi yang kuat dan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan sosial dan pembangunan bangsa. Melalui uji validitas dan reliabilitas yang baik, serta analisis korelasi dan regresi yang kuat, dapat disimpulkan bahwa meningkatkan pendidikan perempuan bukan sekadar mencetak lulusan, tetapi mencetak agen perubahan. Dengan pendidikan, perempuan mampu mengubah realitas dirinya dan lingkungannya, sekaligus menjadi fondasi utama dalam membangun bangsa yang adil, sejahtera, dan berdaya saing.

Langkah awal dalam penelitian ini dilakukan melalui uji validitas dan reliabilitas instrumen untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan benar-benar mampu merepresentasikan fenomena yang diteliti. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item dalam kuesioner memiliki nilai korelasi di atas 0,30, menandakan validitas yang baik. Ini berarti seluruh pertanyaan mampu mengukur secara akurat hubungan antara tingkat pendidikan perempuan dan perubahan sosial serta pembangunan bangsa. Sementara itu, reliabilitas instrumen diuji dengan Cronbach's Alpha dan menghasilkan nilai sebesar 0,87—jauh di atas ambang batas minimum 0,70—yang menandakan bahwa instrumen ini memiliki konsistensi internal yang tinggi. Kedua hasil ini membuktikan bahwa data yang



diperoleh dalam penelitian cukup kredibel untuk dianalisis lebih lanjut, sehingga simpulan yang dihasilkan memiliki dasar metodologis yang kuat dan layak dipercaya dalam konteks ilmu sosial.

Analisis korelasi Pearson mengungkapkan adanya hubungan yang kuat dan signifikan antara tingkat pendidikan perempuan dan pembangunan sosial dengan nilai r sebesar 0,685 ($p < 0,001$). Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan yang dimiliki perempuan, semakin besar pula kontribusinya terhadap transformasi sosial. Korelasi positif ini memperkuat teori-teori yang menyatakan bahwa perempuan terdidik cenderung lebih aktif dalam ranah publik, memiliki kemampuan pengambilan keputusan yang lebih baik, dan menunjukkan partisipasi yang tinggi dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik. Pendidikan mengubah perempuan dari sekadar objek kebijakan menjadi subjek perubahan yang aktif dan berdaya. Ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengembangan diri, tetapi juga sebagai mekanisme struktural untuk mentransformasi masyarakat menuju keadilan sosial.

Lebih jauh, melalui analisis regresi linear sederhana, diketahui bahwa tingkat pendidikan perempuan menjelaskan sekitar 25,2% variasi dalam indikator pembangunan sosial ($R^2 = 0,252$). Meskipun kontribusi ini belum mencapai mayoritas, dalam konteks ilmu sosial angka tersebut sudah cukup bermakna, mengingat banyaknya variabel eksternal lain yang turut mempengaruhi perubahan sosial. Hasil ini memperkuat posisi pendidikan perempuan sebagai salah satu variabel strategis dalam pembangunan bangsa. Artinya, setiap peningkatan satu tingkat pendidikan pada perempuan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup sosial-ekonomi mereka, sebagaimana juga ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar 0,495. Pengaruh ini tidak bisa diabaikan dalam perumusan kebijakan publik dan program pemberdayaan perempuan di tingkat nasional maupun lokal.

Fakta lapangan yang dikumpulkan dari lima provinsi menguatkan temuan kuantitatif. Di Nusa Tenggara Timur, misalnya, perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi tidak hanya mampu menjadi pencari nafkah utama, tetapi juga memimpin organisasi lokal yang fokus pada advokasi pendidikan anak. Keterlibatan semacam ini menunjukkan bahwa pendidikan mampu meningkatkan agency perempuan dalam masyarakat. Mereka menjadi katalisator perubahan yang tak hanya memperjuangkan kepentingan individu, tetapi juga kolektif. Keterlibatan dalam kegiatan sosial, forum musyawarah desa, bahkan lembaga keagamaan mencerminkan transformasi perempuan dari peran domestik ke posisi strategis. Oleh karena itu, pendidikan bukan hanya tentang pencapaian akademik, melainkan juga tentang perluasan ruang partisipasi perempuan dalam pembangunan berkelanjutan.

Temuan lain yang patut dicatat adalah bahwa pendidikan perempuan berkontribusi besar terhadap peningkatan kesehatan keluarga, khususnya anak-anak. Ibu yang berpendidikan tinggi lebih sadar akan pentingnya imunisasi, nutrisi, dan kontrol kesehatan secara berkala. Hal ini sejalan dengan laporan World Bank (2023) yang menyebutkan bahwa setiap tambahan satu tahun pendidikan perempuan dapat menurunkan angka kematian ibu dan anak secara signifikan. Perempuan terdidik juga cenderung memiliki keluarga yang lebih kecil namun berkualitas, karena mereka memiliki pengetahuan dan kontrol lebih dalam perencanaan keluarga. Dalam konteks ini, pendidikan menjadi salah satu determinan penting dalam memutus siklus kemiskinan dan memperkuat kesejahteraan antargenerasi. Maka, pemberdayaan melalui pendidikan juga merupakan bentuk intervensi strategis dalam sektor kesehatan masyarakat.

Berdasarkan seluruh hasil dan analisis, sangat jelas bahwa pendidikan perempuan memiliki efek berlapis yang luas dan mendalam terhadap pembangunan bangsa. Oleh



karena itu, intervensi kebijakan harus diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi perempuan, terutama di wilayah-wilayah marginal. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu menyusun strategi kolaboratif yang mencakup pemberian beasiswa afirmatif, penyediaan fasilitas ramah perempuan, pelatihan keterampilan kepemimpinan, dan pengintegrasian perspektif gender dalam kurikulum nasional. Tidak kalah penting adalah perlunya edukasi masyarakat untuk mengikis nilai-nilai patriarkal yang menghambat kemajuan perempuan. Jika dijalankan secara sistematis dan berkesinambungan, kebijakan ini akan menghasilkan perempuan-perempuan tangguh yang tidak hanya berdaya secara pribadi, tetapi juga menjadi fondasi bangsa yang berdaulat, inklusif, dan adil secara sosial.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan perempuan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap perubahan sosial dan pembangunan bangsa. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki perempuan, semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan kualitas hidup keluarga, keterlibatan dalam kegiatan sosial-politik, serta penguatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Pendidikan telah membuktikan diri sebagai katalisator yang mengubah posisi perempuan dari objek menjadi subjek pembangunan, dengan kapasitas sebagai pengambil keputusan, agen transformasi, dan pemimpin komunitas.

Temuan ini memperlihatkan bahwa pendidikan perempuan tidak hanya memberikan manfaat individual, tetapi juga berdampak kolektif dalam membangun struktur sosial yang lebih adil, demokratis, dan partisipatif. Meskipun demikian, hambatan struktural seperti pernikahan anak, stereotip gender, dan minimnya fasilitas pendidikan yang ramah perempuan masih menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara negara, masyarakat, dan institusi pendidikan dalam menyusun kebijakan afirmatif dan strategi pendidikan yang inklusif, adil gender, dan berbasis kebutuhan perempuan.

Dengan demikian, pendidikan perempuan harus diposisikan bukan sebagai pilihan, melainkan sebagai fondasi strategis dalam menciptakan bangsa yang berdaya saing, sejahtera, dan berkeadilan sosial. Keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada sejauh mana perempuan diberi ruang untuk tumbuh, belajar, dan berkontribusi melalui pendidikan yang bermutu dan setara.

DAFTAR PUSTAKA

- Atkins, E, and F H Pitts. "Cornwall Shows Labour's Green Revolution Needs Governance from the Ground up." *Progressive Britain*, 2024.
- Bank, World. "Education and Gender Equality Report." The World Bank Group, 2023.
- Bo, Nang Sagawah Win. "OECD Digital Education Outlook 2023: Towards an Effective Education Ecosystem." *Hungarian Educational Research Journal* 15, no. 2 (2025): 284–89.
- Ferdinan, William Chicho, Mohamad Rayhan Noerfikri, Pramana Anwas Panchadri, and Ferawati Ferawati. "Implementasi Algoritma Regresi Linear Berganda Untuk Memprediksi Prestasi Siswa." *Bit-Tech* 7, no. 3 (2025): 853–64.
- Hooks, Bell. *Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom*. Routledge, 2021.
- Jorjiana, Siti Amelia. "ASPEK YURIDIS TINDAKAN AFIRMATIF KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 7, no. 1 (2024): 242–55.
- Kabeer, Naila, and Luisa Natali. "Gender Equality and Economic Transformation." *IDS*

- Bulletin* 52, no. 1 (2021): 15–28.
- Leproni, Raffaella, and Liliosa Azara. “‘Women Must Not Be Left Behind’: The UNESCO Path Towards Women’s Empowerment.” In *Scars of War*, 30:21–46. Emerald Publishing Limited, 2025. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/s0895-993520250000030004/full/html>.
- Mautang, Hermanto Z, Deven T Malihing, Adolfina Oualeng, Adryel O Palle, and Aisyah Mau. “Tantangan Tantangan Dan Inovasi Dalam Program Kampus Mengajar KemendikbudRistek 2023: Studi Kasus Di SD Negeri 1 Bira.” *DIAJAR: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 3, no. 3 (2024): 238–44.
- Nababan, Panagitab, Roida Lumbantobing, Harisan Boni Firmando, Maringan Sinambela, and Sudirman Lase. “Analisis Strategi Pendampingan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Kasus Pelecehan Seksual Di Tapanuli Tengah.” *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan* 15, no. 4 (2024).
- Saputra, Lio Edi, Ahmad Dibul Amda, and Deri Wanto. “Implementasi Model Integrasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Pada Pembelajaran Di Smk It Al Husna Lebong.” IAIN Curup, 2022.
- Septiana, Kharisma Alya. “Analisis Kelayakan Wi-Fi Coin Cleon Di PT SaranaInsan MudaSelaras Menggunakan Skala Likert.” In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Universitas’ Aisyiyah Yogyakarta*, 3:932–40, 2025.
- SL, J Fuji Inzani. “Peran Pendidikan Keluarga Dalam Mencegah Stunting Dan Pernikahan Dini Desa Mekatta Kabupaten Majene.” *Celebes Journal of Community Services* 3, no. 2 (2024): 289–93.
- Winatasari, Diah, Retnaning Muji Lestari, and Darmanto Darmanto. “ANALISIS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2024 PASAL 15 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK TERHADAP PENDAMPINGAN IBU HAMIL RESIKO TINGGI DALAM UPAYA MENURUNKAN AKI DI WILAYAH DINAS KESEHATAN KOTA SALATIGA.” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Ar-Rum Salatiga* 9, no. 2 (2025): 45–51.
- Women, U N. “Women’s Empowerment Through Education.” United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, 2022.
- Wu, Zhuo, Zan Wang, Junjie Chen, Hanmo You, Ming Yan, and Lanjun Wang. “Stratified Random Sampling for Neural Network Test Input Selection.” *Information and Software Technology* 165 (2024): 107331.
- Yansyah, Deri, Evy Ratna Kartika Wati, Mega Nurrisalia, M Ilham Kurniawan, Amira Batrisya, and Riska Wulandari. “Pengaruh Pendidikan Bagi Perempuan Untuk Mendapat Kesempatan Kerja Guna Meningkatkan Perekonomian Keluarga.” *Jurnal Pendidikan Non Formal* 1, no. 3 (2024): 13.